

KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA JEMBUL TERHADAP PROSES PENGOLAHAN CIPS PORANG

Wiwin Windarti¹, Pipit Sari Puspitorini², Andhika Cahyono Putra³, Atminal Ernes⁴
Universitas Islam Majapahit^{1,2,3,4}
e-mail : winwindarti11117@gmail.com

ABSTRACT

Porang is one of the leading commodity in the village of Jembul. According to some sources from the village of Jembul, in the village of Jembul continues to experience increased. The main problems of the society in the village of Jembul is the community at large is still selling porang wet and has not implemented the sales in the form of chips which in this case can add more value in the appeal of the sale in the form of wet. Government as one of the perpetrators of the economy (households), have an important function in the economy that is functioning as the stability, allocations, and distributions. To this end the need for government policies that can facilitate the community in facilitating the process of processing porang.

Keywords : porang, governance

ABSTRAK

Porang merupakan salah satu komoditi unggulan di desa Jembul. Menurut beberapa sumber dari perangkat desa terkait, produktivitas porang di desa Jembul terus mengalami peningkatan. Permasalahan utama masyarakat di Desa Jembul adalah masyarakat pada umumnya masih menjual porang basah dan belum menerapkan penjualan dalam bentuk chips yang dalam hal ini dapat menambah nilai lebih di banding penjualan dalam bentuk basah. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilitas, alokasi, dan distribusi. Untuk itulah perlunya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat mempermudah masyarakat dalam mempermudah proses pengolahan porang.

Kata kunci : porang, pemerintahan

PENDAHULUAN

Desa Jembul merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, yang terbentang di pegunungan Anjasmoro. Desa Jembul memiliki 93 KK (kartu keluarga) dengan 303 penduduk. Desa Jembul memiliki keindahan dengan perpaduan pegunungan, tanaman kopi yang menghampar sepanjang jalan menuju area Air Terjun Kabejan, perbukitan, pertanian, perkebunan dan kondisi jalan yang sudah di betonisasi.

Salah satu permasalahan penting dalam pembangunan kesehatan nasional adalah terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan. Permasalahan ini juga terjadi di Kabupaten Mojokerto, kecamatan Jatirejo, desa Jembul. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain letak geografis, biaya, jumlah tenaga kesehatan dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, seperti puskesmas dan jaringannya, yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Beberapa upaya telah dilakukan, misalnya dengan meningkatkan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas, puskesmas menjadi puskesmas perawatan, menempatkan tenaga kesehatan baik medis maupun paramedis, meningkatkan anggaran pembiayaan kesehatan dan membuat kebijakan yang mendukung. Namun dalam implementasinya belum dilaksanakan dengan maksimal. Sesuai dengan latar belakang di atas, maka diperlukan suatu penelitian mengenai peran kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem rujukan yang berguna untuk mengetahui permasalahan di lapangan, sehingga ke depan dapat dilakukan berbagai perbaikan.

Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan idealnya proses pembuatan kebijakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan tidak bersifat satu arah. Kebijakan bisa dibilang merupakan sebuah aturan dari pemerintah yang harus di ikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat ikut patuh terhadap kebijakan yang sudah dibuat. Pemerintahan Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanatkan, bahwa penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat,

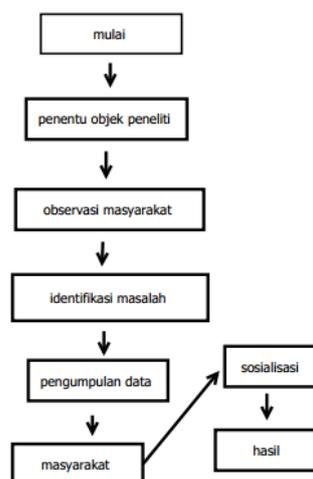
tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan, bahwa "susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang". Hal itu berarti, bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Berdasarkan juga pada awalnya perumusan secara formal desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dikatakan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur Pemerintahan Daerah serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, khususnya pada tingkat Pemerintahan Desa. Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, dimana penataan Administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. yang mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan..

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Jembul Kec. Jatirejo Kab. Mojokerto. Di mulai pada tanggal 09 agustus 2018 – 09 September 2018.

Tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan penelitian ini ada beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap penentuan Objek Penelitian
Pada tahap ini penulis melakukan penentuan objek dengan meneliti sebuah permasalahan masyarakat dan Pemerintahan di Desa Jembul
2. Observasi Lapangan Awal
Tahap ini Penulis melakukan Observasi terhadap Masyarakat agar mengolah porang menjadi Chips.
3. Tahap Identifikasi Masalah
Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar mengolah porang menjadi Chips.
4. Tahap Pengumpulan Data
Wawancara
5. Tahap Pengolahan Data
sosialisasi dan praktik langsung cara mengolah porang menjadi chips.



Gambar 1 Alur Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan data

Desa jembul memiliki 93 KK (kartu keluarga) dengan 303 penduduk. Ke istimewaan dari kehidupan dari desa jembul adalah kearifan lokal yang masih kental diantaranya adalah rasa kekeluargaan yang kental, rasa aman di desa dan gotong royong dalam membangun desa. Wisata alam dan potensi sumberdaya alam khususnya porang yang sangat melimpah tetapi belum di kelolah dengan baik.

Pembahasan hasil

Pemerintah desa jembul dalam hal ini Bapak Lurah desa Jembul setelah mempelajari bagaimana potensi porang yang mempunyai nilai tambah dengan adanya pengolahan menjadi chips, maka Pemerintah Desa Jembul membuat beberapa kebijakan- kebijakan antara lain:

1. Pemerintah Desa Jembul memberikan lahan sebagai tempat pengolahan chips porang terpadu.
2. Pemerintah Desa Jembul melakukan kerjasama dengan Universitas Islam Mojopahit untuk pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] <http://yathimaryathie.blogspot.com/2017/01/makalah-kebijakan-pemerintah-dalam.html>

[2] Dr Sahya Anggara, M.Si *kebijakan publik* penerbit PUSTAKA SETIA bandung